

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Koperasi**

##### **1. Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa latin (*co-operatio*) yang berarti bekerjasama. Dalam ilmu ekonomi koperasi adalah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang, dan atau badan hukum bekerjasama atas dasar sukarela melaksanakan pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2012), Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.

Sedangkan menurut UU Nomor 17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di

bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Rudianto (2015) mendefinisikan koperasi yaitu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Secara umum dapat disimpulkan, koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Kegiatannya melandaskan prinsip koperasi yang artinya aktivitas koperasi bertujuan untuk meningkatkan dan mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

## **2. Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Rudianto (2010) tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal, antara lain:

- a. Untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat
- b. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional

Koperasi sangat membantu perkembangan ekonomi anggotanya, karena dengan bergabung dalam sebuah koperasi, koperasi dapat mensejahterakan anggota.

Modal serta kinerja anggota koperasi juga membantu perekonomian masyarakat sekitar, salah satunya koperasi simpan pinjam, masyarakat terbantu saat akan meminjam dana pada koperasi.

### **3. Nilai dan Prinsip Koperasi**

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2002, nilai koperasi dibedakan menjadi nilai yang mendasari dan nilai yang diyakini serta terdapat prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh koperasi. Nilai dan prinsip tersebut antara lain:

- a. Nilai yang mendasari kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian
- b. Nilai yang diyakini oleh anggota koperasi yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain
- c. Prinsip koperasi yang meliputi:
  - 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
  - 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
  - 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
  - 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
  - 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi

- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, koperasi juga bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. .

#### **4. Jenis-jenis Koperasi**

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dikelompokkan menjadi 4 jenis. Merupakan PSAK No. 27 tahun 2007 dalam koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

- a. Koperasi simpan pinjam dan pemasaran
- b. Koperasi konsumen dan produsen

#### **B. Akuntansi**

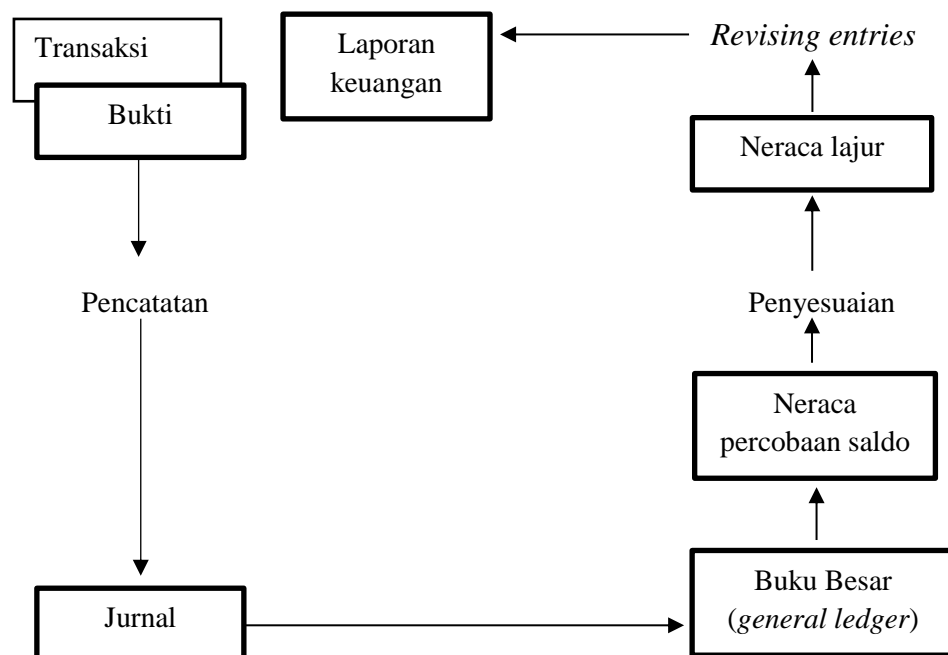
Akuntansi berasal dari kata asing yaitu *accounting*, yang artinya adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.

Menurut Hans Kartikahadi (2016) akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Kieso, et al dan Martini (2012) mendefinisikan akuntansi adalah suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.

### C. Proses (Siklus) Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010), Proses akuntansi adalah organisasi formulir atau transaksi, catatan (jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan) dan laporan yang dikordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan laporan keuangan untuk perusahaan. Siklus akuntansi atau disebut juga proses akuntansi digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Proses (Siklus) Akuntansi**

**Sumber: Sistem Akuntansi (2010)**

## D. Laporan Keuangan

### 1. Pengertian Laporan Keuangan.

Menurut Harahap (2009) mendefinisikan, laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Sedangkan Kieso (2011) menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu sarana komunikasi informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas.

Dari beberapa pengertian laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi selama periode tertentu, dan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

Adapun macam-macam laporan keuangan menurut *International Financial Reporting Standart (IFRS)* meliputi:

- a. Laporan Posisi Keuangan (*Balance Sheet*). Dalam laporan posisi keuangan diungkapkan jumlah aset (*asset*), liabilitas (*liability*), dan ekuitas (*equity*).
- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif (*Profit and Loss Komprehensif Statement*). Yang dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif

adalah pendapatan operasional dan pendapatan non operasional, beban operasional dan beban non operasional, laba ditahan, laba atau rugi bersih.

- c. Laporan Perubahan Ekuitas (*Equity Statement*). Laporan perubahan ekuitas berisi laporan tentang ekuitas yang disetorkan, laba ditahan, laba tahun berjalan maupun deviden.
- d. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*). Mencakup laporan arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar selama periode akuntansi.
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi catatan yang tidak terdapat pada laporan keuangan atau penjelasan lengkap tentang laporan keuangan tersebut.

## **2. Pengguna Laporan Keuangan**

Purba (2009) menjelaskan pada dasarnya, pengguna laporan keuangan terbagi atas dua kelompok, yaitu pengguna eksternal dan internal.

Kelompok internal yaitu manajemen, manajemen berkepentingan melihat besar kecilnya laba perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan. Informasi pada laporan keuangan juga dibutuhkan untuk menentukan strategi, pengawasan dan menjadi ukuran dalam memberikan insentif karyawan. Manajemen bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan.

Kelompok pemakai laporan keuangan eksternal antara lain sebagai berikut:

- a. Penanam modal
- b. Pemberi pinjaman
- c. Masyarakat
- d. Pemerintah dan badan regulator lainnya
- e. Pemasok dan kreditur usaha lainnya
- f. Pelanggan
- g. Karyawan.

### **3. Tujuan Laporan Keuangan**

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil keputusan.

Menurut FASB No.1, terdapat dua tujuan pelaporan keuangan, antara lain:

- a. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, investor potensial, kreditur, dan pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan serupa lainnya.
- b. Memberikan informasi tentang prospek arus kas untuk membantu investor dan kreditur dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi



keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan hal yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atau pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi.

#### **E. Standar Akuntansi Koperasi**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.

Pedoman dalam standar akuntansi koperasi pada awalnya menggunakan PSAK 27. Dalam PSAK 27 mengatur sistem akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koperasi dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan *Exposure Draft*, Pernyataan Pencabutan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.8 terkait PSAK 27 yang membahas akuntansi koperasi sehingga pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang akan dimulai. PSAK No.8 menyebutkan bahwa pencabutan PSAK 27 adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk suatu entitas publik tertentu.

Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu pada IFRS. PSAK No.8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya menggantungkan prinsip-prinsip PSAK 27. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

Menurut Veronica dan Rudianto (2011) menyebutkan bahwa lahirnya SAK ETAP dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan SAK khusus untuk UMKM, koperasi, BPR, dan entitas tanpa akuntabilitas lainnya agar bisa memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi entitasnya sehingga dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya.

Sedangkan menurut Martani (2015) menyebutkan bahwa entitas yang dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau SAK ETAP.

## **F. SAK ETAP**

### **1. Gambaran umum**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini berpedoman kepada *IFRS Small Medium Sized Enterprises (IFRS for SMEs)*.

SAK ETAP ditetapkan akibat sulit dalam penerapannya, maka dari itu yang digunakan adalah SAK ETAP dengan standar yang lebih sederhana pada tanggal 19 Mei 2019, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan harus bisa menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi dan mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Menurut Sartono (2015) pada awalnya pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi menggunakan PSAK No. 27 tahun 1998 tentang Akuntansi Perkoperasian, kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Nomor 04/M.KUKM/XI/2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi dan usaha kecil dan menengah atau dikenal dengan SAK ETAP.

SAK ETAP merupakan pedoman standar yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), standar ini bertujuan untuk memudahkan koperasi, usaha kecil dan menengah atau entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangannya. SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS, sehingga lebih mudah di

implementasikan tetapi tetap memberikan informasi yang handal. Perbedaan PSAK NO. 27 dengan SAK ETAP terletak pada tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

## **2. Ruang Lingkup SAK ETAP**

Menurut IAI dalam SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa Akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

## **G. Perbedaan SAK ETAP dan PSAK**

Sedangkan Wirahardja, R & Wahyuni, E.T (2009) menjelaskan secara rinci, perbedaan antara PSAK No.27 dan SAK ETAP adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan SAK ETAP dan PSAK No. 27**

No	Elemen	PSAK	SAK ETAP
1.	Penyajian Laporan Keuangan	a. Laporan posisi keuangan b. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan c. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar d. Aset lancar e. Liabilitas jangka pendek f. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan.	Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aset keuangan</li> <li>b. Properti investasi yang diukur pada nilai wajar</li> <li>c. Aset biologik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar</li> <li>d. Kewajiban berbunga jangka panjang</li> <li>e. Aset dan kewajiban pajak tangguhan.</li> </ul>
2.	laporan Laba Rugi	laporan laba rugi komprehensif <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif</li> <li>b. Laba rugi selama periode</li> <li>c. Pendapatan komprehensif lain selama periode</li> <li>d. Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan</li> </ul>	Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi

3.	Penyajian Perubahan Ekuitas		Sama dengan PSAK kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain
4.	Catatan Atas Laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan</li> <li>b. Struktur</li> <li>c. Pengungkapan kebijakan</li> <li>d. Akuntansi</li> <li>e. Sumber estimasi ketidakpastian</li> <li>f. Modal</li> <li>g. Pengungkapan lain</li> </ul>	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.
5.	Laporan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Arus kas aktivitas operasi</li> <li>b. Arus kas aktivitas investasi</li> <li>c. Arus kas aktivitas pendanaan</li> <li>d. Arus kas mata uang asing</li> <li>e. Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas</li> </ul>	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Arus kas aktivitas operasi : metode tidak langsung</li> <li>b. Arus kas mata uang asing, tidak diatur</li> </ul>
6.	Laporan Keuangan Konsolidasi dan Terpisah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan penyajian laporan keuangan konsolidasi</li> <li>b. Entitas bertujuan khusus</li> <li>c. Prosedur konsolidasi</li> <li>d. Laporan keuangan tersendiri</li> <li>e. Laporan keuangan gabungan</li> </ul>	Tidak dapat diatur

7.	Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan	<p>Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan, mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan</li> <li>b. Kesalahan mendasar</li> <li>c. Perubahan kebijakan akuntansi: penerapan suatu standar akuntansi keuangan, perubahan kebijakan akuntansi yang lain.</li> </ol>	SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada kesalahan mendasar dan laba rugi luar biasa)
8.	Instrumen Keuangan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan</li> <li>b. Instrumen keuangan dasar</li> <li>c. Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu</li> <li>b. Klaifikasi <i>trading</i>, <i>held to maturity</i>, dan <i>available for sale</i>. Hal tersebut mengacu ke PSAK 50 (1998)</li> </ol>
9.	Persediaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran persediaan</li> <li>b. Biaya persediaan</li> <li>c. Biaya pembelian</li> <li>d. Biaya konversi</li> <li>e. Biaya lain-lain</li> <li>f. Biaya persediaan pemberian jasa</li> <li>g. Teknik pengukuran biaya</li> <li>h. Pengakuan sebagai beban</li> </ol>	Sama dengan PSAK

10.	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup entitas asosiasi</li> <li>b. Metode akuntansi</li> <li>c. Metode biaya</li> <li>d. Metode ekuitas</li> <li>e. Model nilai wajar</li> </ul>	Sama dengan PSAK kecuali akuntansi hanya menggunakan metode biaya
11.	Properti investasi	Metode akuntansi: metode nilai wajar dan biaya	Metode akuntansi: model biaya
12.	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan pendekatan kompenisasi</li> <li>b. Pengukuran menggunakan model biaya atau model revaluasi</li> <li>c. Pengukuran biaya perolehan</li> <li>d. Pengakuan pengeluaran</li> <li>e. Tidak perlu nilai residu, metode penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir periode</li> </ul>	<p>Sama dengan PSAK, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menggunakan pendekatan kompenisasi</li> <li>b. Revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.</li> <li>c. Tidak perlu nilai residu.</li> </ul>
13.	Aset tidak berwujud	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip umum untuk pengakuan</li> <li>b. Pengakuan awal, pengukuran selanjutnya</li> <li>c. Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun</li> <li>d. Penurunan nilai</li> </ul>	Sama dengan PSAK, kecuali aset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha
14.	Sewa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengatur perjanjian yang mengandung sewa</li> <li>b. Kalsifikasi bersifat <i>principle based</i></li> <li>c. Laporan keuangan <i>lessee</i> dan <i>lessor</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa</li> <li>b. Klasifikasi sewa: kombinasi <i>IFRS for SMEs</i> dan SFAS 13</li> <li>c. Laporan keuangan <i>lessee</i> dan <i>lessor</i></li> </ul>



15.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewajiban diestimasi</li> <li>b. Kewajiban kontinjensi</li> <li>c. Aset kontinjensi</li> </ul>	Sama dengan PSAK
16.	Ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjelasan</li> <li>b. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan (PT)</li> <li>c. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk (PT)</li> <li>d. Reorganisasi</li> <li>e. Selisih penilaian kembali.</li> </ul>	Sama dengan PSAK, kecuali: reorganisasi dan selisih penilaian kembali
17.	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjualan barang</li> <li>b. Penjualan jasa</li> <li>c. Kontrak konstruksi</li> <li>d. Bunga, deviden, dan royalty</li> <li>e. Lampiran kasus pengakuan pendapatan</li> </ul>	Sama dengan PSAK
18.	Biaya Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen biaya pinjaman</li> <li>b. Kapotalisasi biaya pinjaman</li> </ul>	Biaya pinjaman langsung dibebankan.
19.	Penurunan nilai aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penurunan nilai persediaan</li> <li>b. Penurunan nilai non persediaan</li> <li>c. Penurunan nilai goodwill</li> </ul>	<p>Sama dengan PSAK, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset</li> <li>b. Tidak mengatur penurunan nilai goodwill</li> <li>c. Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang.</li> </ul>
20.	Imbalan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Imbalan kerja jangka pendek</li> <li>b. Imbalan pasca kerja untuk manfaat pasti</li> </ul>	Sama dengan PSAK kecuali untuk manfaat pasti menggunakan PUC

		<p>menggunakan PUC</p> <p>c. Imbalan jangka panjang lainnya</p> <p>d. Pesangon pemutusan kerja</p>	<p>dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan.</p>
21.	Pajak Penghasilan	<p>a. Menggunakan deferred tax concept</p> <p>b. Pengakuan dan pengukuran pajak kini.</p>	<p>a. Menggunakan <i>tax payable concept</i></p> <p>b. Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan</p>
22.	Mata uang pelaporan	<p>a. Mata uang pencatatan dan pelaporan</p> <p>b. Mata uang fungsional</p> <p>c. Penentuan saldo awal</p> <p>d. Penyajian komparatif</p> <p>e. Perubahan mata uang pencatatan.</p>	<p>Sama dengan PSAK mata uang pelaporan</p> <p>a. Mata uang fungsional</p> <p>b. Pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional</p> <p>c. Perubahan mata uang fungsional.</p>
23.	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan	<p>a. Peristiwa yang memerlukan penyesuaian</p> <p>b. Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian</p>	<p>Sama dengan PSAK</p>
24.	Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<p>a. Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa</p> <p>b. Pengungkapan</p>	<p>Sama dengan PSAK</p>
25.	Aktivitas Khusus	<p>a. Akuntansi perkoperasian</p> <p>b. Akuntansi pertambangan umum</p> <p>c. Akuntansi reksa dana</p> <p>d. Akuntansi perbankan dan asuransi</p>	<p>Sama dengan PSAK tidak ada aturan</p>

26.	Ketentuan Transisi		a. Retrospektif atau prospektif b. Perpindahan ke SAK ETAP
27.	Tanggal Efektif		Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011.

Menurut (Martini, 2011) SAK ETAP lahir untuk memenuhi kebutuhan para entitas dan yang setara. Penyusunan SAK ETAP mengacu pada *IFRS for SMEs* yang diterbitkan oleh IASB. *IFRS for SMEs* merupakan bentuk penyederhanaan dari IFRS karena terdapat pengurangan opsi dan pengungkapan di dalamnya, tidak terdapat pengakuan dan pengukuran yang berbeda dengan IFRS dan focus dari *IFRS for SMEs* adalah perusahaan menengah ke atas, termasuk entitas anak dari perusahaan terbuka.

Secara umum, terdapat perbedaan pokok antara SAK ETAP dan PSAK IFRS. Perbedaan tersebut adalah:

- a. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
- b. SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung dalam laporan arus kas
- c. SAK ETAP menggunakan *cost model* untuk investasi ke asosiasi, dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan
- d. SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55

SAK ETAP hanya menggunakan *cost model* untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK IFRS boleh memilih *cost model* atau model revaluasi.

## **H. Laporan Keuangan SAK ETAP**

### **1. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan**

Menurut SAK ETAP (IAI, 2009) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan.

c. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus handal.

e. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisilain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk

hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

f. Pertimbangan sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut, melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan.

g. Kelengkapan

Agar bisa diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya, kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar oleh karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

h. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

i. Tepat waktu

Agar tepat waktu dan relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya.

j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat.

## **2. Komponen-Komponen Laporan Keuangan SAK ETAP**

a. Neraca

SAK ETAP mengatur yang disajikan dalam neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal-tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan.

Dalam penyusunan neraca, SAK ETAP mengatur beberapa informasi yang harus dijabarkan dalam neraca. Informasi tersebut meliputi:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 3) Persediaan
- 4) Properti investasi
- 5) Aset tetap dan Aset tidak berwujud
- 6) Utang usaha dan utang lainnya
- 7) Aset dan kewajiban pajak
- 8) Kewajiban diestimasi dan ekuitas.

b. Laporan Laba Rugi

SAK ETAP mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. SAK ETAP juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya, laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh deviden kepada distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

d. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. SAK ETAP mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi. Pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi.

e. Laporan Arus Kas

SAK ETAP mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana cara penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

f. Catatan atas Laporan Keuangan

SAK ETAP mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

### **3. Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP**

a. Penyajian Wajar

Menurut IAI dalam SAK ETAP, laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas.

b. Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP, entitas laporan keuangan yang mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.



c. Kelangsungan Usaha

Menurut IAI dalam SAK ETAP pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha.

d. Frekuensi Pelaporan

Menurut IAI dalam SAK ETAP, entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (informasi komparatif) minimum satu tahun sekali

e. Penyajian yang Konsisten

Menurut IAI dalam SAK ETAP, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten.

Kecuali:

- 1) Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian dalam pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
- 2) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.
  - a) Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tidak praktis.

b) Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan, dan sifat penyesuaian telah dibuat serta jika jumlah komparatif direklasifikasi.

f. Informasi Komparatif

Menurut IAI dalam SAK ETAP, informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

g. Materialitas dan Agregasi

Menurut IAI dalam SAK ETAP, pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

h. Laporan Keuangan Lengkap

Menurut IAI dalam SAK ETAP, Laporan keuangan entitas meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

i. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan.

## **I. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Penelitian Uly Astari (2016) dalam skripsinya berjudul “Evaluasi Penerapan SAK ETAP pada Primer Koperasi Kartika Benteng Emas Palembang.” Bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk laporan keuangan Primkop Kartika Benteng Emas Palembang, dan apakah bentuk format laporan keuangan Primkop Kartika Benteng Emas Palembang telah sesuai dengan SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun primkop kartika benteng emas Palembang hingga saat ini adalah sebatas laporan perhitungan hasil usaha dan neraca. Laporan keuangan yang disajikan primkop kartika benteng emas Palembang masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar SAK ETAP.

Penelitian Viona Yelitasari (2016) tentang “Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Koperasi.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi laporan keuangan koperasi lampung lestari pertiwi, koperasi tri satya dharma, koperasi cipta karya, koperasi simpan pinjam pedagang kecil, primer koperasi redatama, koperasi dharma yukti, dan koperasi pilar utama sudah sesuai dengan SAK ETAP. Dari beberapa sampel yang di teliti, hanya satu yang menerapkan SAK ETAP. Masih terdapat kesalahan dalam penempatan akun-akun pada laporan keuangan koperasi. Adanya ketidakseimbangan total pasiva dan total aktiva pada salah satu sampel.

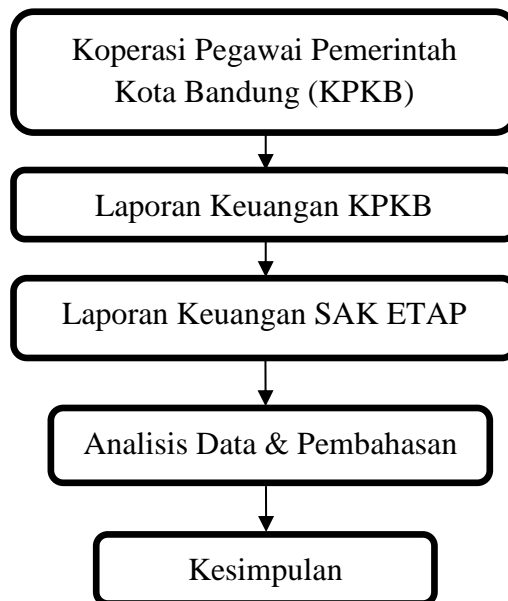
Bahkan koperasi sisanya tidak menyertakan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Penelitian dari Sabella (2016) yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tirta Sari.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan koperasi simpan pinjam (KSP) Tirta Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK ETAP di KSP Tirta Sari telah berjalan dengan baik, yaitu sebesar 70% sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan sisanya sebesar 30% yang tidak sesuai dengan SAK ETAP adalah catatan atas laporan keuangan karena di KSP Tirta Sari belum membuat catatan atas laporan keuangan (CALK).

Menurut penelitian Andreas (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi atas Penerapan Standar Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada KPRI di Kota Bandar Lampung)” dinyatakan bahwa KPRI sudah melakukan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan namun sebagian besar laporan keuangan disajikan oleh KPRI tidak sesuai dengan SAK ETAP. Karena banyak faktor penyebab KPRI tidak menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP, antara lain: kurangnya sumber daya manusia yang menguasai SAK ETAP serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang SAK ETAP oleh KPRI.

## J. Kerangka Penelitian

Berikut ini kerangka penelitian yang peneliti kemukakan mengenai SAK ETAP pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung:



**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Penelitian**